

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA BANJIR DI KOTA MANADO

JUNIOR HERMAN JOHANES MASIKOME  
FLORENCE DAICY J LENGKONG  
VERY. Y. LONDA

## ABSTRAK

*The government provides a disaster program to prepare citizens, especially those who live in disaster-prone areas to be able to be ready and alert to natural disasters that can occur at any time. Article 26 of Law No. 24 of 2007 concerning disaster management explains that the community has the right to obtain education, training, and skills in implementing disaster management, because Indonesia has a high risk of natural disasters including the city of Manado. In community empowerment, in general it can be interpreted as a process that builds people or society through developing community capacity, changing community behavior, and organizing the community. The purpose of empowerment for the community is to provide opportunities for development and development of living welfare, the creation of independence in building a decent and sufficient life for citizens with a developing economic life. Especially the flood disaster in Manado City is classified as a high category so that based on the results of disasters that always exist every year and central BPBD and BNPB coordination meetings, Manado City receives training and mentoring programs for the Tangguh village program from the Manado BPBD in accordance with the village disaster resilient theme for the year 2017 is a flood.*

*Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Korban, Bencana Banjir*

## 1. PENDAHULUAN

Kata pemberdayaan sudah sering kali terdengar ketika ada suatu masalah didalam sebuah masyarakat. Dan Pemberdayaan itu adalah keadaan-keadaan yang terjadi atau hal-hal yang dilakukan dilingkungan masyarakat dengan upaya membangun pembangunan yang bertumpu pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang berada di desa/kelurahan adalah penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku yang akan merespon bencana di sekitarnya. Dan ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana Oleh karena itu, dengan memanfaatkan semua potensi sumberdaya yang dimiliki, masyarakat desa/kelurahan dapat menjadi tangguh terhadap dampak bencana, sehingga risiko korban jiwa, kerugian harta, dan lain-lain akan bias diperkecil dan bahkan dihindari.

Dan Pemerintah melalui BNPB melakukan suatu program terhadap masyarakat dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun non alam, dengan melaksanakan program desa tangguh bencana di desa/kelurahan yang terdampak bencana. Masyarakat yang berada di

desa/keluarahan adalah penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku langsung yang akan merespon bencana di sekitarnya. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan semua potensi sumberdaya yang dimiliki, masyarakat desa/keluarahan dapat menjadi tangguh terhadap dampak bencana, sehingga risiko korban jiwa, kerugian harta, dan lain-lain akan bisa diperkecil dan bahkan dihindari.

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012). Berdasarkan definisi tersebut, tidak mudah bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk mencapai ketangguhan terhadap bencana karena ketangguhan ini bersifat multi-disiplin dan multi-sektoral, khususnya ketangguhan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Daerah kota manado merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak ancaman dan potensi bencana yang beraneka ragam, antara lain letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor,

kekeringan, angin kencang, gelombang pasang, banjir dan masih banyak lagi. Kota Manado secara geografis terletak di antara 10 25' 88" – 10 39' 50" LU dan 124 04' 00" – 124 06' 00" BT. Tipe iklim Kota Manado termasuk sub tipe iklim Am (hujan tropika). Pada musim penghujan jumlah hujan cukup besar, sehingga meskipun ada musim kering (kemarau) yang pendek sub soil tidak mengalami kekeringan. Berdasarkan tipe hujan Schmidt dan Ferguson, Kota Manado termasuk tipe hujan golongan A (sangat basah). Curah hujan rata-rata tahunan 3.187 mm, sedangkan temperatur udara rata-rata tahunan 25-27 celcius. Berdasarkan data BNPB Tahun 2010, Kota Manado termasuk dalam tingkat resiko "tinggi" terhadap ancaman banjir dan "sedang tinggi" terhadap gerakan tanah longsor.

Melihat beberapa kejadian bencana banjir yang terjadi di Kota Manado sepanjang tahun 2017 yang menibulkan dampak korban bencana mencapai 29,072 jiwa, 1 meninggal dunia, 2 luka ringan (BPBD MANADO 2017).

Pemerintah memberikan program kebencanaan untuk menyiapkan warga masyarakat khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana untuk mampu selalu siap dan siaga dalam menghadapi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam pasal 26 UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, karena Indonesia mempunyai resiko bencana alam yang tinggi tak terkecuali daerah kota manado.

Dengan adanya program tersebut kondisi masyarakat yang sebelumnya belum mampu mengantisipasi bencana banjir dan belum mengerti bagaimana cara mengevakuasi diri dan mengevakuasi orang sekitarnya bila terjadinya banjir, dan akhirnya sekarang bisa mengantisipasi, menanggulangi, dan mengevakuasi diri sendiri tanpa menunggu unsur terkait.

Dengan adanya program Desa Tangguh Bencana, masyarakat cukup terbantu dengan adanya program dari pemerintah tersebut, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala-kendala yang berasal dari masyarakat sendiri yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengantisipasi bencana atau kurangnya sumber daya manusia, ketergantungan pada suatu unsur terkait atau pemerintah, penguasaan teknologi yang rendah, kurangnya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dan materi tentang penanggulangan desa tangguh bencana yang disediakan dalam program tersebut.

Ada beberapa masalah yang penulis temui dilapangan yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat korban bencana banjir di kota manado, dalam hal program desa tangguh bencana antara lain : (1) kurangnya kerja sama antar masyarakat dan pemerintah; (2) kurangnya sarana dan prasarana yang ada; (3) kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi bencana disekitarnya; (4) kurangnya sumber daya manusia yang ada.

Dan sasaran dari pemberdayaan ini ialah bagaimana masyarakat sadar akan potensi bencana di daerahnya, memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana dan kemampuan untuk mengurangi resiko, serta memiliki ketahanan dan kekuatan untuk membangun kembali kehidupannya setelah terkena dampak bencana dan telah siap mengandalikan diri sendiri dalam upaya penanggulangan bencana yang akan datang.

## **11. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Dari definisi diatas, tampak ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Menurut Kartasasmita (1996), berdasarkan maknanya, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari 'dalam' yang dapat diperkuat dengan unsur-unsur dari 'luar'. Sejalan dengan itu, Payne (dalam Kartasasmita 1996) mengatakan bahwa pemberdayaan pada intinya ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang ia dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Pemberdayaan menurut Adi (2003), merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (on-going process). Ini menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan harus benar-benar dirancang sebagai proses yang berkelanjutan, bukan program pemberdayaan yang hanya sebagai "proyek" yang temporer sifatnya. Artinya, program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh berbagai stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) tidak berakhir dengan selesainya suatu program. Proses pemberdayaan hendaknya harus berlangsung selamanya, meskipun pada awalnya harus ada intervensi dari luar, namun harus tercipta suatu keadaan dimana komunitas tersebut mampu secara mandiri menjalankan proses pemberdayaan tersebut bagi komunitas mereka

Menurut Ambar Teguh S, (2004; 80-81, tujuan pemberdayaan bagi masyarakat memberikan kesempatan pengembangan dan pembangunan kesejahteraan hidup, terciptanya kemandirian dalam membangun kehidupan yang layak dan cukup bagi warga negara dengan kehidupan perekonomian berkembang.

1. Mempersiapkan diri menghadapi semua bencana atau kejadian yang tidak diinginkan.

2. Menekan kerugian dan angka korban yang dapat timbul akibat dampak suatu bencana.
3. Meningkatkan kesadaran semua pihak dalam masyarakat atau organisasi terhadap bencana sehingga terlibat dalam proses penanggulangan bencana.
4. Melindungi anggota masyarakat dari ancaman, bahaya atau dampak bencana.

Samaryadi (2005;11) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program membangun melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual, dan komitmen bersama dalam menetapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

## **2. Konsep Bencana Banjir**

Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dikenal pengertian dan beberapa istilah terkait dengan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Manajemen bencana pada dasarnya merupakan konsep penanggulangan bencana. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya

bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Menurut Ramli (2010) ada empat tujuan manajemen bencana, yaitu:

1. Mempersiapkan diri menghadapi semua bencana atau kejadian yang tidak diinginkan.
2. Menekan kerugian dan angka korban yang dapat timbul akibat dampak suatu bencana.
3. Meningkatkan kesadaran semua pihak dalam masyarakat atau organisasi terhadap bencana sehingga terlibat dalam proses penanggulangan bencana.
4. Melindungi anggota masyarakat dari ancaman, bahaya atau dampak bencana.

### **3, Faktor-Faktor Penyebab Banjir**

Sikap masyarakat yang kurang sadar terhadap lingkungan sangat berpengaruh pada resiko terjadinya banjir. Sikap masyarakat yang kurang sadar mengenai membuang sampah agar pada tempatnya, menjaga keasrian lingkungan, dan pentingnya menanam pohon menjadi faktor yang sangat penting untuk terjaganya lingkungan dan agar terhindar dari bencana banjir. Selain dapat menghindarkan dan tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berikut beberapa faktor penyebab banjir menurut Ramli (2010):

- a. Curah hujan tinggi.
- b. Permukaan tanah lebih rendah dari permukaan air laut.
- c. Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit atau terbatas.
- d. Banyak pemukiman yang dibangun pada dataran (bantaran) sepanjang sungai.
- e. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan dipinggir sungai.
- f. Kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai.

### **4. Penanggulangan Banjir**

Tujuan penanggulangan bencana dalam perka BNPB NO.1 Tahun 2012 tentang desa tangguh bencana meliputi,

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan
3. Melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya
4. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
5. Membangun partisipasi dan kemitraan public serta swasta
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermwawan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana social dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana social.

### **111. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya), secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian alamiah (Moleong, 2006). Penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita (bungin, 2010). Jenis dan data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (dalam surjaweni, 2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskripsi dan jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang mampu melihat mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan kenyataan dari obyek yang diteliti.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Lokasi Penelitian**

Kota Manado merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki potensi ancaman bencana yang beraneka ragam seperti: kekeringan, tanah longsor, angin kencang dan banjir. Khususnya bencana banjir Kota Manado tergolong dalam kategori tinggi sehingga berdasarkan hasil bencana-bencana yang selalu ada di tiap tahunnya dan rapat koordinasi antara BPBD dan BNPB pusat, Kota Manado mendapatkan pelatihan dan pendampingan program desa tangguh bencana dari BPBD Manado sesuai dengan tema program desa tangguh bencana untuk tahun 2017 adalah bencana banjir.

Latar belakang sebagian besar penduduk Kota Manado bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru atau pegawai swasta (41,44%), sebagai wiraswasta (20,57%), pedagang (12,85%), petani/peternak/nelayan (9,17%), buruh (8,96%). Sisanya bergerak di sektor jasa dan lain-lain (7%).

Berdasarkan hasil observasi penduduk di Kota Manado sebagian besar tinggal di area dataran rendah dengan ancaman banjir. Dengan kondisi wilayah yang sebagian besar dataran rendah dan berpotensi banjir Kota Manado membutuhkan pelatihan atau pendampingan khusus tentang kebencanaan.

### **Hasil Penelitian**

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk : 1) Memberikan panduan bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. 2) Memberikan acuan bagi pelaksana dan pemangku kepentingan PRB. Sasaran dari kegiatan pemberdayaan masyarakat korban bencana banjir adalah masyarakat yang

terdampak bencana, sedangkan bentuk pengembangan kapasitas adalah memberikan pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

Program Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu program penanggulangan bencana dari BPBD Kota Manado di bawah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana untuk memberikan pelatihan untuk menyiapkan warga yang tinggal di daerah rawan bencana mampu beradaptasi dan menyikapi bencana secara mandiri.

Pelaksanaan program desa tangguh bencana BPBD Manado di kelurahan pakowa, kelurahan dendengan dalam, dan kelurahan ternate tanjung dilaksanakan dengan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Program**

Program desa tangguh bencana merupakan program yang di tujuhan untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan memiliki potensi ancaman bencana yang tinggi. Program desa tangguh bencana berdasarkan perka BNPB No. 1 Tahun 2012 memiliki tujuan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menganalisa ancaman dan kerentanan bencana yang ada di wilayahnya serta potensi yang dimiliki sehingga masyarakat mampu mandiri dan beradaptasi dengan lingkungannya. Carter (Robert J. Kodoatie, 2006; 69) pengelolaan bencana merupakan suatu ilmu terapan atau aplikatif yang mencari dan mengobservasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan pencegahan, mitigasi dan pemulihan.

Proses perencanaan program desa tangguh bencana BPBD Manado dilakukan

melalui kegiatan Musrebangdes yang dilaksanakan di pemerintah daerah. Perencanaan dilakukan dengan tahapan menemukan daerah yang mempunyai potensi bencana yang tinggi, hasil musrebangdes yang dilakukan BPBD Provinsi, BPBD Manado dan LSM serta pemerintah daerah ditindaklanjuti dengan melakukan advokasi kepada pemerintah daerah oleh BPBD Manado. Proses perencanaannya selanjutnya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan informasi kepada kelurahan tentang program desa tangguh bencana di Kota Manado di 3 Kelurahan. Kelurahan Pakowa, Kelurahan Dendengan Dalam, dan Kelurahan Ternate Tanjung.

Proses perencanaan di atas sudah sesuai dengan isi Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang desa tangguh bencana, bahwa mekanisme perencanaan dan penganggaran Desa Tangguh Bencana di bahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Pelaksanaan program desa tangguh bencana dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu kegiatan rakornis dan gladi. Dalam kegiatan rakornis tahapan pelaksanaan yang dilakukan peserta meliputi, pengenalan program desa tangguh bencana dan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Manado, diskusi kerentanan bencana, ancaman bencana, dan kapasitas kelurahan pakowa, kelurahan dendengan dalam, dan kelurahan ternate tanjung, diskusi dan pembuatan peta kerentanan, ancaman dan kapasitas, diskusi penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi komunitas, pengembangan sistem komunikasi dan terakhir penyusunan rencana kontijensi dan rencana evakuasi.

Tahap berikutnya dalam pelaksanaan Program Tangguh Bencana adalah penggunaan metode pembelajaran menggunakan

## **2. Kecakapan Hidup Yang Diperoleh Peserta**

Kecakapan hidup yang di dapatkan peserta dalam program desa tangguh bencana BPBD Manado khususnya di Kota Manado kelurahan pakowa, kelurahan dendengan dalam, dan kelurahan ternate tanjung berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mendapatkan kecakapan untuk mampu beradaptasi dengan ancaman bencana yang mereka miliki, kecakapan dalam memahami dan mengelola potensi ketiga keluraha tersebut untuk dijadikan faktor pendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, kecakapan dalam berkomunikasi untuk bekerja sama dalam tim FPRB, kecakapan dalam menggunakan peralatan penanggulangan bencana, seperti tenda darurat, HT dll, kecakapan memecahkan masalah hal ini ditunjuk dengan penyusunan RPB dan RAK, kecakapan untuk bertindak secara mandiri.

Dalam teori satori (Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga teknis; 2003) kecakapan hidup tidaka semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja (vocational job), namun ia harus memiliki kemampuan dasarnya secara fungsional, seperti menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar dan mempergunakan teknologi.

Program Desa Tangguh Bencana memberikan pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup tentang pencegahan bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dalam kasus ini adalah di kelurahan pakowa, kelurahan dendengan dalam, dan kelurahan ternate tanjung, dalam teori Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga Tekni (2004: 7) hakikat pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan nonformal merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap dan kemampuan yang dapat dijadikan oleh warga belajar untuk dapat mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan program desa tangguh bencana dalam memberikan kecakapan hidup kepada peserta meliputi:

- a. Kecakapan pribadi  
Peserta diberikan pendampingan untuk mengenal lingkungan mereka sendiri dengan membimbing peserta untuk mengetahui ancaman bencana serta kapasitas yang ada dalam lingkungan mereka sendiri.
- b. Kecakapan sosial  
Peserta program Desa Tangguh Bencana diberikan pendampingan untuk mengatur kerja sama dalam hal komunikasi dan penyebaran informasi kebencanaan
- c. Kecakapan vokasional  
Kecakapan vokasional yang didapat peserta dalam kegiatan program Desa Tangguh Bencana berupa kecakapan kerjasama dalam tim penanggulangan bencana khususnya banjir yang sudah diberikan materi pelatihan pada kegiatan gladi serta peserta mampu mengenali potensi yang dimiliki kelurahannya.

### 3. Faktor Pendukung Dan Penghambat

Faktor pendukung dalam sebuah program merupakan hal yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program. Berdasarkan hasil penelitian, faktor

pendukung yang terdapat dalam progra desa tangguh bencana antara lain:

1. Kelurahan pakowa, kelurahan dendengan dalam, dan kelurahan ternate tanjung sebelumnya sudah memiliki FPRB dari hasil pelatihan oleh LSM, dalam penanggulangan bencana
2. Peserta memiliki kekompakan dan solidaritas yang tinggi dalam bekerja secara tim.

Pelaksanaan program tidak pernah terlepas dengan faktor penghambat. Faktor penghambat yang dirasakan selama proses penyelenggaraan desa tangguh bencana BPBD Manado di tiga kelurahan tersebut berdasarkan penelitian antara lain:

1. Peserta kurang mampu untuk bisa diajak berfikir
2. Latar belakang pendidikan peserta yang sebagian besar merupakan lulusan SMP
3. Peserta kebingungan dalam menangkap materi yang diberikan oleh narasumber karena penyampaian terlalu cepat
4. Peserta kurang berani untuk bertanya
5. Media dan fasilitas belum memadai
6. Pendanaan program
7. Dukungan pemerintah kelurahan dan masyarakat masih kurang

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pemberdayaan masyarakat korban bencana banjir di kota manado, tentang program desa tangguh bencana sebagaimana telah dideskripsikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan program desa tangguh bencana BPBD Manado di kelurahan pakowa, kelurahan dendengan dalam, dan kelurahan ternate tanjung dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan program desa tangguh bencana BPBD Manado dilakukan dengan melibatkan BPBD Manado, LSM dan pemerintah daerah melalui kegiatan musrembangdes. Metode yang digunakan dalam pendampingan

program adalah menggunakan partisipatory niral aparsial dengan menjadikan masyarakat menjadi pelaku utama dalam menganalisa ancaman, kerentanan dan kapasitas yang mereka miliki dalam kelompok diskusi. Program desa tangguh bencana ini terdiri dari 7 kali kegiatan rakornis dimana peserta diberikan materi:

- a) Analisa ancaman, potensi,
- b) Penyusunan rpb dan rak,
- c) Pelatihan komunikasi
- d) Penyusunan kontijensi dan kegiatan 3 kali kegiatan gladi materi yang di dapat.
2. Kecakapan hidup yang diperoleh peserta dalam kegiatan desa tangguh bencana BPBD Manado di kelurah pakowa,

- kelurahan dendengan dalam, dan kelurahan ternate tanjung antar lain :
- a) Mampu menganalisa dan memahami ancaman, kerentanan serta potensi di ketiga kelurahan tersebut
  - b) Masyarakat atau peserta mampu mandiri dan berdaya sendiri dalam menghadapi bencana
  - c) Mengetahui kondisi dan potensi daerah mereka
  - d) Mampu menyebarkan informasi dan berkomunikasi
  - e) Penanganan bencana menjadi lebih terorganisir
  - f) Memiliki rencana penanggulangan bencana
  - g) Mengetahui jalur evakuasi saat terjadi bencana
  - h) Mempunyai pemetaan wilayah kelurahan sendiri
3. Faktor pendukung yang terdapat dalam pelaksanaan desa tangguh bencana BPBD Manado antara lain a) beberapa orang yang mengikuti program merupakan relawan b) peserta kompak dan solid dalam mengikuti pelaksanaan program khususnya dalam kegiatan gladi. Sementara itu faktor penghambatnya antara lain: a) tidak semua peserta mampu di ajak berfikir, b) kurangnya prasarana dan sarana yang memadai c) teknik evaluasi yang digunakan belum disusun secara sistematis d) kurangnya daya dukung pemerintah dan masyarakat kelurahan.

### Saran

Setelah penelitian terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat korban bencana banjir, dalam hal program desa tangguh bencana BPBD Manado dalam menyiapkan kecakapan hidup masyarakat untuk menghadapi bencana di kelurahan pakowa, kelurahan dendengan dalam, dan kelurahan ternate tanjung, peneliti mengajukan saran sebagai berikut ::

1. Penyelenggaraan program desa tangguh bencana BPBD Manado diharapkan

- mempunyai struktur evaluasi yang jelas yang disesuaikan berdasarkan kompetensi yang telah disepakati bersama.
2. Pemilihan perekrutan peserta lebih diperhatikan lagi, akan lebih baik jika perekrutan peserta diberikan kriteria-kriteria tertentu khususnya dalam hal persyaratan pendidikan.
  3. Program desa tangguh bencana diharapkan segera memiliki keberlanjutan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  4. Pemberian kecakapan hidup kebencanaan di dalam rakornis sebaiknya dilakukan dengan terjun langsung atau survei langsung di lapangan khususnya dalam menentukan ancaman, kerentanan dan potensi tidak hanya melalui diskusi kelompok, agar hasil lebih akurat dan peserta tidak bosan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Agustino Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Bakornas PB. 2007. Pedoman Penanggulangan Banjir Tahun 2007-2008. Jakarta.
- Bappenas. 2007. Peluncuran Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana Tahun 2006-2009. Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Jamasy, O. 2004. Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan kemiskinan. Jakarta Selatan: Blantika



Kartasmita, Ginjar 1995. Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi Pidato Pengakuan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi. Malang: Universitas Brawijaya.

Moleong, L, J, 2006. Metodologi penelitian kualitatif , Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ramli, Soehatman. 2010. Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management). Jakarta. Dian Rakyat

Soetomo, 2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar...

Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. CV. Citra Utama, Jakarta